



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 01.a/HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum...

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.014-Kpt05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2021**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2020 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent Of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan
5. Tim Penguatan Peraturan Perundangan-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;

7. Tim...

7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ende  
pada tanggal : 2 Februari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,**

Ttd.

**ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

Kasubag Hukum,



**RINCE BERTHA SAILANA**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

NOMOR : /HK.03.1-KPT/5308/KPU-  
KAB/II/2021

TANGGAL : FEBRUARI 2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Adolorata M. Da Lopez Bi, S. Sos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Fransiska Dollo Naga, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Fransiskus Lothar Piara, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Izmir Rizaldi, S. Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Maria Rosita De So, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol	Kasubag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Ende; - Melaksanakan so-sialisasi dan inter-nalisasi manajemen perubahan dalam Reformasi Birokrasi.
2.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Anggota	
3.	Olimpius Desrin	Staf	Anggota	
4.	Yoseph A. Manulemba	Staf	Anggota	
5.	Yoseph E. Pati Penu	Staf	Anggota	

II.TIM...

II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan identi- fikasi Peraturan Perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Ende; - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang ti- dak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Ende.
2.	Evaristus Mbui	Staf	Anggota	
3.	Antonius Pare	Staf	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Ade Irma, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang mena- ngani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Nurkasih Abubekar, SE	Staf	Anggota	
3.	Josafat I. Rinu	Staf	Anggota	
4.	Yomans Woge	Staf	Anggota	
5.	Mikael Perwirokarso, ST	Staf	Anggota	
6.	Maria Angelina Ndungga, SE	Staf	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Hildegardis Timu, S. Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;  - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Antonia Ernesta Sewa	Staf	Anggota	
3.	Fidelis Tegu	Staf	Anggota	
4.	Aloysius W. Suban Liwu	Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN SYSTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; -Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
2.	Evaristus Mbui	Staf	Anggota	-Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; -Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Antonius Pare	Staf	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Ende;</li> <li>- Meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>.</li> </ul>
2.	Evaristus Mbui	Staf	Anggota	
3.	Antonius Pare	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Hildegardis Timu, S. Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun indikator kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Ende.</li> </ul>
2.	Antonia Ernesta Sewa	Staf	Anggota	
3.	Fidelis Tegu	Staf	Anggota	
4.	Aloysius W. Suban Liwu	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol	Kasubag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat</li> <li>- dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Olimpius Desrin	Staf	Anggota	
3.	Yoseph Albertus Manulemba	Staf	Anggota	
4.	Yoseph E. Pati Penu	Staf	Anggota	

IX.TIM...

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	Hildegardis Timu, S. Kom	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;</li> <li>- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
3.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Teknis	Anggota	
4.	Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol	Kasubag Program dan Data	Anggota	
5.	Ade Irma, S.Sos	Kasubag Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,

Ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE







NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Penataan Tata laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU 2. Implementasi Undang-undang keterbukaan Informasi Publik KPU	1. Pengiriman Operator untuk mengikuti pelatihan 2. Pengisian berbagai Aplikasi	1. Operator mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) 2. 100% Aplikasi terisi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		1. Pembentukan pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID)	1. Pelaksanaan kegiatan PPID	1. Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Pelaksanaan kegiatan PPID	2. Pelaksanaan kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID														√
		1. Penerapan sistem arsip	1. Penerapan sistem arsip	1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Kerjasama dengan badan arsip dan perpustakaan daerah	2. Kerjasama dengan badan arsip dan perpustakaan daerah	2. Terjalin kerjasama dengan badan arsip dan perpustakaan daerah					√									
		3. Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU																
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1. penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun				√										
			2. pelaksanaan SOP	2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	1. Evaluasi pelaksanaan SOP	1. Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP							√							√







